

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Riset ini telah berhasil mengungkapkan kelemahan politik kewargaan terjadi secara nyata dalam pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta. Kelompok nelayan dipinggirkan secara ekstrim. Negara hanya memberikan kelompok nelayan kewargaan secara legal status saja, sedangkan dimensi keanggotaan, hak, dan partisipasi tidak diberikan oleh negara.

Politik kewargaan dalam pemaknaannya menjadi perdebatan seiring perkembangan zaman dan tantangan kewargaan yang menjadi hal baru disetiap persoalannya. Diskusi yang dibawa oleh riset ini tentang kewargaan dan kelompok nelayan menambah pengalaman perkembangan kewargaan di Indonesia serta demokratisasi di dalamnya. Riset ini melihat kapasitas kewargaan yang mampu berhadapan dengan negara untuk mengatur berjalannya negara sesuai dengan kehendak rakyat akan membuat demokrasi berjalan ke arah yang sebenarnya. Perlawanan kelompok nelayan terhadap pembangunan reklamasi teluk Jakarta menjadi topik yang hangat ditengah pembangunan Indonesia dalam mencapai kesejahteraan dan menjadi salah satu juga pembangunan di Indonesia yang mengalami penolakan oleh warganya. Seperti pembangunan reklamasi di Bali, Makassar, dan juga pembangunan bendungan Wadas yang mendapatkan penolakan keras oleh warganya.

Praktik kewargaan oleh kelompok nelayan di akar rumput meminta dihentikannya pembangunan reklamasi karna dampaknya adalah persoalan yang naik ke permukaan, tetapi tanpa mereka sadari atau bahkan belum mengerti adalah mereka selama ini mengalami peminggiran. Dampak ekonomi yang digaungkan karna menurunnya penghasilan tangkapan ketika proses pengeruukan pulau reklamasi, juga menjadi isu yang mereka bawa tanpa menyadari bahwa ada hak-hak mereka sebagai warga tidak terpenuhi. Pengamatan yang riset ini sorot adalah

proses pelemahan politik kewargaan yang dialami dalam internal warga itu sendiri dan dari luar warga itu sendiri.

Aspek yang menjadi akar dari pelemahan politik kewargaan yang dilakukan oleh negara dengan cara:

1. Pengakuan Sebagai Warga yang diabaikan

Negara berupaya untuk melakukan pemisahan terhadap warga pribumi dan pendatang dengan tujuan menciptakan konflik horizontal dan melemahkan posisi warga yang menuntut hak-haknya sebagai warga dengan meragukan bahwa warga yang menolak pembangunan reklamasi harus dicek apakah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta dan menanggapi Jakarta selama ini tidak memiliki nelayan dan nelayan yang menolak bukan nelayan asli Jakarta.

2. Hak-hak Warga yang Tidak Dipenuhi

Salah satu syarat mendapatkan hak-hak sebagai warga adalah diakui oleh negara suatu kelompok merupakan bagian dari warga. Dengan tidak adanya pengakuan warga, secara sistematis hak-hak sebagai warga juga tidak terpenuhi. Hal tersebut menjadi cara negara dalam melemahkan gerakan perlawanan kelompok nelayan dengan tidak diberikannya keadilan akan hak-haknya sebagai warga. Ketidakadilan secara fundamental terhadap hak-hak warga adalah mereka diakui sebagai warga yang berprofesi nelayan, hak untuk mendapatkan laut yang bersih, hak untuk mencari mata pencaharian dengan layak, hak mendapatkan kesejahteraan sosial, sampai hak-hak untuk berpartisipasi. Marjinalisasi negara terhadap suatu kelompok menjadikan kelompok nelayan terpinggirkan dan dilemahkan untuk berdaya menggugat pembangunan reklamasi.

3. Tidak Ada Pelibatan Partisipasi

Pengabaian keterlibatan warga oleh negara melalui kebijakan publik menjadi bentuk pengondisian warga hanya berperan menerima otoritas dan program politik tanpa mengaktifkan partisipasi mereka. Dampaknya

bisa terlihat dengan belum terbangun kesadaran bahwa mengaktifkan kapasitas politik dapat mengubah kebijakan yang dinilai merugikan warga.

Kualitas politik kewargaan dalam kasus ini ada tiga dimensi yang tidak tercapai pemenuhannya karna terdapat permasalahan didalamnya yaitu pada dimensi keanggotaan, dimensi hak, dan dimensi partisipasi. Berdasarkan stratifikasi yang dijelaskan oleh Stokke, permasalahan kewargaan yang dihadapi oleh kelompok nelayan adalah peminggiran secara politik, budaya, dan juga sosial. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kualitas kewargaan hanya bersifat formal, warga secara *legal status* diberikan tetapi fungsi dan perannya tidak diberikan. Unsur kewargaan spasial menjadi penting karena dapat memberikan kekuatan kolektif warga komunitas dalam dari upaya-upaya pelemahan yang terjadi karena kewargaan spasial yang berasal dari komunitas luar yang tidak terikat secara legal status.

Sampai sini, dengan pengalaman yang diceritakan oleh kelompok nelayan di Muara Angke dan yang terjadi sesungguhnya baik yang mereka lakukan dan mereka rasakan dampaknya, riset ini ingin menyampaikan pentingnya politik kewargaan disadari oleh warga itu sendiri untuk mewujudkan hak-hak nya tanpa menunggu negara memberikan. Kesadaran kewargaan menggunakan politiknya juga menjadi kekuatan yang harus dimanfaatkan warga ketika negara berjalan tidak sesuai kehendak warga dan ketika negara tidak memberikan hak warga sepenuhnya. Warga menjadi unsur penting dalam negara dan demokrasi meskipun dominasi elitisme dan oligarki mengakar kuat di Indonesia, tetapi harapan untuk membangun kapasitas warga yang sebenarnya mampu menjadi “sutradara” dalam panggung kekuasaan berjalannya negara bukan hanya menjadi “penonton” yang tidak dapat berbuat apa-apa.

Jadi pelemahan politik kewargaan yang dialami nelayan juga bisa menjelaskan yang ditandai dengan peminggiran keanggotaan, hak yang tidak setara, dan partisipasi warga yang dikucilkan. Semuanya itu merupakan prinsip-prinsip fundamental yang nampaknya menjadi gambaran kondisi kewargaan di Indonesia

yang mengalami pelemahan tetapi yang riset ini ingin tekankan adalah pelemahan kewargaan terjadi karna kewargaan yang masih lemah sehingga agenda kebijakan-kebijakan yang menguntungkan elite dan korporat begitu mudah dijalankan dan diterapkan. Negara nampaknya sudah bisa mengukur kekuatan politik kewargaan yang hal tersebut tentu tidak bisa dibiarkan. Perlu Langkah transformasi politik kewargaan yang nyata untuk membangun rezim kewargaan yang dapat setara dengan negara.